PUSAT PEMBERITAAN (INFORMATION CENTRE) ANGKATAN BERSENDJATA

INFO UNTUK PARA PENDJABAT²/PETUGAS²;/PERTAHANAN/KEAMANAN, KARYAWAN ANGKATAN BERSENDJATA DAN MASJARAKAT UMUM JANG BERKEPENTINGAN.

SK MENPEN NO. 0524/PEN/SK/DIRDJEN/PPC/1966

DIREKTORAT UMUM/HANKAM
Alamat Redaksi : Medan Merdeka Barat 13 Djakarta.
Tilp. Redaksi/Tata Usaha : OG 46743

DJAKARTA, SELASA, 28 FEBRUARI 1967.

EDISI PAGI :

INTISARI BERITA

NO:530/TH.II/1967.

I. U M U M :

1 - 1 Pengumuman Bersama Komando Gabungan-Pepelda Djaya :
DILARANG MENGADAKAN DEMONSTRASI DAN TJORAT... hal 1
TJORET JANG BERSIFAT MENGGANGGU PERSEORANGAN, hal 1
ATAU GOLONGAN..... hal 1

1 - 2 AMANAT PAK HARTO PADA PENUTUPAN PENDIDIKAN... hal 2
PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL..... hal 2

1 - 3 1 OKTOBER 1965 KOLONEL SAELAN MEMBAWA..... hal 9
PRESIDEN SUKARNO KE HALIM..... hal 9

1 - 4 TELAH 5 TAHUN AEROFLOT MELAJANI HUBUNGAN..... hal 12
UDARA DJAKARTA-MOSKOW..... hal 12

1 - 5 PENJERAHAN KEKUASAAN PRESIDEN SUKARNO..... hal 14
BUKANLAH KARENA APPROACH DARI PRESIDIUM..... hal 14
KABINET ATAU DARI ABRI..... hal 14

1 - 6 Sidang Mahmilub Supardjo ke VIII :
SUPARDJO MENJANGKAL TELAH MENGAMBIL ..... hal 19
DJENDRAL-DJENDRAL..... hal 19

II. EKU INBANG :

2 - 1 PENERTIBAN DALAM APARATUR EKONOMI SUPAJA..... hal 1
SEGERA DILAKSANAKAN..... hal 1

III. LUAR NEGERI :

3 - 1 GOLDBERG ADAKAN PEMBITJARAAN2DI TOKYO..... hal 1

3 - 2 MONGOLIA MENTJAP MAO IMPERIALIS..... hal 1

3 - 3 50 NEGARA BELUM MELAPOR KEPADA PBB..... hal 2
TENTANG SANKSI THD RHODESIA..... hal 2

IV. OLAH RAGA :

4 - 1 FRIENDLY GAMES KKO-AURI-PWI DJAYA..... hal 1

Dan lain-lain.

------(w)------

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pengumuman Bersama Komando Gabungan
Pepelda Djaya:
DILARANG MENGADAKAN DEMONSTRASI DAN TJORAT-TJORET JANG BERSIFAT MENGGANGGU PERSEORANGAN ATAU GOLONGAN

* Tiap perdjoangan hendaknja disalurkan lewat Lembaga-2 Konstitusi.

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Dalam pengumuman bersama Komando Gabungan Pe-Pelda Djaya jang ditanda tangani oleh Pangdam V/Djaya Majdjen Amir Machmud , Pangkowilu V Komd. Ud. Saleh Basa rah, Pangdamar III Komd. Laut Harjono Nimpuno dan Pang dak VII Irdjen Pol. Drs.S.Brotodirdjo SH Sabtu jang - lalu menjatakan bahwa demi untuk mentjiptakan iklim dan suasana jang menguntungkan bagi stabilisasi negara bangsa dan rakjat Indonesia sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Pernjataan Kebulatan Tekad Para Pangli ma ABRI tgl.24 Pebruari 1967 dalam daerah Djakarta Ra ya dan sekitarnja tidak diperkenankan untuk mengadakan demonstrasi atau kegiatan2 jang sedjiwa dan senafas dengan itu.

Dalam rangka mendjamin dan membina kesatuan dan persatuan bangsa, negara dan rakjat Indonesia pada umumnja serta masjarakat Djaya chususnja tidak diperke nankan adanja tjorat-tjoret , selebaran2, tempelan2 jg bersifat menggganggu perasaan atau penghinaan perseora-ngan maupun golongan.

Pengumuman bersama Komando Gabungan Pepelda Dja-Ya tsb selandjutnja menjatakan bahwa demi untuk mendja min tertjapainja tata masjarakat jang tertib dan aman tidak diperkenankan adanja tindakan2/kegiatan2 jang bersifat kekerasan, paksaan atau segala bentuk manifesta-sinja.

Jang tak mentaati akan diambil tindakan tegas.

Tanpa mengurangi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ataupun kritik, hendaknja mass media dalam me ngadakan pemberitaan, tulisan, penerbitan berdasarkan fakta2 dan tidak melanggar norma2 kesopanan/kesusilaan dan djangan bersifat memanaskan situasi, menimbulkan perpetjahan serta menggganggu ketertiban dan keamanan u-mum. Lebih landjut pengumuman bersama itu menjatakan bah wa demi untuk mendjundjung tinggi dan mendjamin kelang sungan hidup berkonstitusi jg merupakan aspirasi dari bangsa, negara dan rakjat Indonesia hendaknja tiap per djoangan disalurkan lewat lembaga2 Demokrasi jang ber-konstitusi.

Achirnja pengumuman bersama itu menjatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung djawab dan memikul se gala konsekwensi atas isi jang tersirat dan tersurat dlm Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS/Pangti ABRI tgl. 20-2-1967, Pernjataan Kebulatan Tekad Panglima ABRI tgl. 24 -2-1967 dan Pengumuman Komando Gabungan Pepelda Djaya ini maka kepada siapapun dan dari golongan manapun jang tak mentaati ketentuan ini akan diambil tindakan tegas.

(R.32/A-5/PAB/II/67)

----(W)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 - 2 - 1967.

AMANAT PAK HARTO PADA PENUTUPAN PENDIDIK
AN PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL

Djakarta, 28 Pebruari (PAB).-
Bertempat di Wisma Warta ,hari Selasa ini djam 09.30 akan dilangsungkan upatjara penutupan pendidikan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Kedjaksaan Agung,di mana akan memberikan sambutan Ketua Presidium Djenderal Suharto.

Pada kesempatan tsb.Djaksa Agung Majdjen Sugih Arto akan memberikan laporan2 djalannja pendidikankepada Ketua Presidium ,sedangkan berkas tjeramah dan rumusan sendikat Deskusi Kewaspada an Nasional akan diserahkan oleh Kepala Direktorat Pusdikat Kedjaksaan Agung kepada Djaksa Agung ,serta kemudian diteruskan Kepada Djenderal Suharto .

Demikian menurut Kepala Humas Kedjaksaan Agung kepada Pusat Pemberitaan Angkatan Bersendjata,

(R.35/PAB-08/II/67)

---(ATM)---

BANDIT BERSENDJATA API MERAMPOK
DI DJL.PASEBAN

+ Petugas Hansip Ketakutan?

Djakarta, 28 Pebruari (PAB).-

Pada hari Sabtu pagi jbl.sekira djam 04.00 kawanan bandit bersendjata api telah merampok disalah satu rumah penduduk di djalan Paseban dan berhasilme njikat barang2 perhiasan ,uangtunai,sebuah Telavisi dan sebuah mesin djahit.Menurut berita jang dikumpul kan PAB kawaan pendjahat itu berdjumlah 6 orang dan sa lah seorang diantaranja berpakaian seragam hidjau ber sendjata api Stengun.

Pada hari pagi itu sang pendjahat mengetuk rumah sikorban keturunan Tjina,tetapi pemilik rumah ti dak bersedia membuka pintu ,serta mengatakan bahwa ka lau ada urusan supaja datang besok siang nja.Atas dja waban pemilik rumah ini kemudian pendjahat2 menggunakan tjara lain,jakni mendjelaskan kepada pemilik rumah bah wa dia adalah petugas C.P.M.dimana achirnja sikorban terpaksa membukakan pintu.

Begitu rumah dibuka ,pemilik rumah tiba2 di todong dan diantjam supaja tidak berteriak dimana achirnja kawanan pendjahat dapat dengan tenang mendjalankan operasinja mengambil milik si korban seper ti diatas.

Ketika./.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 - 2 - 1967.-

Kemudian kawanan pendjahat mengangkut hasil rampasannja kekendaraan mobil jang disediakannja, kebetulan petugas Hansip, liwat, jang terus memberikanteguran kepada salah seorang pehdjahat. Petuagas hansip jang tidak mengetahui kedjadian jang sebenarnja menanjakan " mau pindah kemanalagi" dan didjawab oleh pendjahat pindah kerumah lain dan hal tsb. banja berlalu sampai disitu sadja dan Hansip terus ronda.

Petugas Hansip kurang lihai dan ketakutan

Mengingat pada waktu itu adalah masih bera da pada djam malam, jaitudjam 04.00 , tidaklah mungkin seorang penduduk akan pindah rumah pada malam itu. Sehubungan dengan itu dapatlah dikatakan bahwa petugas Hansip tsb. kurang lihai karena berhasil dikibuli oleh pendjahat. Sementara ituseorang Hansip lain jang mentjurigai perbuatan jang tidak pada tempathja itu, serta mempunjai prasangka lain, terus meninggalkan temannja jang menegur pendjahat, dan menghilang ketempat lain.

Setelah sang pendjahat pergi membawa hasil rampasannja , pemilik rumah keluar dengan lesu, jang terus ditegur oleh hansip tsb. dengan kata2 :" mau pindah rumah kemana lagi ", dan mendapat djawaban dari sikorban, bahwa dia tidak akan pindah, dan baru sadja dirampok . Atas djawaban tsb, barulah petugas Hansip jang tinggal sendiri itu mengerti persoalan jang sebenarnja, dan mengeluarkan tembakan peringatan sebanjak empat kali, tetapi apa mau dikatakan sang pendjahat telah kabur dengan hasil gemilang.

(R.35/PAB-08/II/67)

----(ATM)----

UU PERFILMAN SUPAJA SEGERA DI BENTUK

Djakarta, 28 Pebruari (PAB).-

Berbitjara soal perfilman Nasional dewasa ini, Anggota DPRGR H.Munir Abisudjak, jang djuga sebagai Presiden Komisaris PT Kedjora Film, menjatakan kepadaPers kemaren pagi, bahwa/jangla mpau perfilman kita selalu diru sak dan di rongrongoleh ungur2 Lekra/PKI. Oleh sebab itu sekarang pun bukanlah mustahilperongrongan ini akan dilantjarkan oleh gerpol dan antek2 golongan tsb. /disaat2 Dikatakan lagi bahwa utk menghindarkan diri dari antek penjalahgunaan oknum2 tertentu baik pihak Pemerintah maupun swasta dari kemungkinan2 jang ada dalam dunia perfilman , maka perlu segera diadakan UU mengenai perfilman Nasional. Ditambahkan , bahwa utk keperluan itu, Munir Abisudjak akan mengusulkan supaja/sebuah Panitya DPRGR guna RUU perfilman Nasional tersebut,

/dibentuk (R.34/A-10/PAB/II/67)

----(ATM)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 -2- ' 67

PEMANDANGAN UMUM ATAS TIGA BUAH RUU MASIH PERLU PERUBAHAN

Djakarta, 27 Pebruari (PAB)

Sidang Pleno DPR GR kemarin siang telah menjelesaikan atjara Pemandangan umum atas 3 buah RUU ,tentang Susunan MPR/DPR ; tentang pemilihan umum dan RUU tentang kepartaian , keormasan & kekaryaan, dibawah pimpinan Wakil Ketua DPRGR Madjdjen Sjarif - Thajeb.

Rentjana 21 orang pembitjara akan naik mimbar tetapi karena 3 orang mengundurkan diri dan lainnja tidak ada kabar beritanja , sehingga jang bitjara hanja 9 orang sadja.

Dalam pemandangan umum babak terachir itu , para pembitjara umumnja masih berangapan bahwa untuk menerima ketiga RUU tersebut masih banjak dibutuhkan perobahan2. Dan oleh karenanja antara Pemerintah dan DPRGR masih memerlukan pendekatan2 lebih banjak lagi guna menjesuaikan pendapat2nja mengenai ketiga RUU tersebut.

Dapat ditambahkan bahwa menurut rentjana Pemerintah akan memberi djawaban atas pemandangan Umumini, pada hari Kamis tgl. 2 Maret 1967 jang akan datang.

(R36/A-10/PAB/II/67)

----(w)----

GPII BANTU PENUH DJENDRAL SUHARTO

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

E.Z. Muttaqien ketua Umum Panitya kebangkitan GPII dalam kawatnja kepada Djendral Suharto menjatakan bahwa massa GPII diseluruh Indonesia menjediakan segenap kemampuannja untuk membantu Djendral Suharto dalam tugasnja sebagai penguasa pemerintahan tertinggi.

G.P.I.I. jakin bahwa Pantjsila ,UUD'45 dan segala atribut demokrasi jang mndjadi landasan perdjoangan kita adalah suatu harapanbangsa untuk sukses-2 selandjutnja dalam perdjoangan Orde baru.

Selandjutnja Muttaqien menerangkan bahwa kewadjiban kita sekarang ialah mengamankan persidangan MPRS agar mampu menjuarakan demokrasi jang bersumber dari Hati nurani rakjat.

(R32/Rel/PAB/II/67)

----(w)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BEBAS MENGIMPOR PUPUK

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Dengan keputusan No.13/2/1967 tgl. 17 Pebruari 1967 Menteri Pertanian memberikan kebebasan kepada para importir untuk mengimpor pupuk dari Luar Negeri .Para importir dapat mempergunakan devisa dari BE atau lainnja, untuk selandjutnja memperdagangkan pupuk tsb setjara bebas.

Pemberiankebebasan impor pupuk ini diharapkan dapat lebih banjak membantu bidang pertanian dan perkebunan rakjat dalam meningkatkan produksi.Demikian oleh Humas Dep. Pertanian.

(RO48/M/PAB/II/67)

----(w)----

FORMULIR GANTI NAMA DILARANG DIPERDJUAL-BELIKAN.

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Dalam rangka penggantian nama WNI keturunan Asing tidak diperkenankan melalui perantaraan ,selandjutnja diserukan kepada para WNI keturunan asing jg akan menganti namanja supaja berhubungan dengan kantor walikota masing2.

Selandjutnja ditegaskan oleh Walikota Djakarta Barat R. Sudardja bahwa usaha mempertjepat proses asimilasi WNI keturunan asing kedalam tubuh bangsa Indonesia adalah memupuk dan membina nation dan character building sesuai dengan keputusan Kabinet Ampera.

Dilarang diperdjual belikan

Sebagaimana telahdidjelaskan dalam pertemuan beberapa minggu jang lalu antara Gubernur dengan para anggota Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa(LPKB) bahwa formulir tsb tidak diperkenankan untuk diperdjual belikan , dan bila ada terdjadi pendjualan diluar adalah mendjadi tanggung djawab para walikota masing2.

(RO39/A-14/PAB/II/67)

----(w)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 -2- 1967

LETKOL ACHMAD LAMO DILANTIK SEBAGAI GUBERNUR SULSEL

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Dirdjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Brigdjen Sunandar baru2 ini telah berangkat ke Makasar atas nama Menteri Dalam Negeri untuk melantik Letkol Achmad Lamo sebagai Gubernur Kepala Daerah Prop.Sulsel jang akan dilangsungkan pelantikannja Selasa pagi.

Letkol Achmad Lamo dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 25 Pebruari No.UP.6/1/39-261 telah ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Prop. Sulsel terhitung mulai tgl. pelantikannja.

(039/A-14/PAB/II/67).

-----(m)-----

MENTERI DN TERIMA DUBES DJEPANG DAN ATMIL PERANTJIS

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Menteri Dalam Negeri Letdjen BasukiRachmat baru2 ini telah menerima kundjungan Dubes Djepang Akira Nishi Yana. Kundjungan tsb merupakan kundjungan kehormatan dan perkenalan itu berlangsung selama kurang lebih satu djam dalam suasana ramah tamah dan persahabatan.

Selesai menerima kundjungan Dubes Djepang,Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat telah menerima pula kundjungan kehormatan Dubes Perantjis Claude Choysson jang disertai oleh AtmilPerantjis Kol. Boef.

(R039/A-14/PAB/II/67)

----(m)----

REFRESHING COURSEDEP.PERTANIAN AKAN DIBUKA DI TJIAWI/

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Menteri Pertanian Majdjen Sutjipto SH hari Sabtu pagi tgl. 4 Maret jadakan meresmikan pembukaan Refreshing pedjabat2 Pimpinan Dep. Pertanian bertempat di Lembaga Upgrading /Pendjendjangan Kader Pertanian Tjiawi (Bogor).

(R048/M/PAB/II/67).

----(m)-----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BUNG KARNO TELAH NJELEWENG DARI KETENTUAN2 HUKUM

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Menurut KAMI Djabar penjerahan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden kepada Djendral Suharto merupakan salah satu usaha untuk mensukseskan sidang istimewa MPRS jang akan datang .

KAMI Djabar dalam pernjataannja itu djuga menuntut agar hukum tetap berlaku terhadap Bung Karno jang njata2 telah menjeleweng dari ketentuan2 hukum jang berlaku di Indonesia selama pemerintahan.

(R45/A-24/PAB/II/67)

-----(w)-----

PENDIDIKAN ASISTEN RONTGEN DIRS.DR. TJIPTO MANGUNKOESUMO

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

Bagian Pendidikan Asisten Rontgen pada rumah sakit Dr. Tjiptomangunkoesumo Djakarta tahun ini memberi kesempatan kepada para tjalon untuk dididik sebagai Asisten Rontgen . Untuk sementara jang mendapat prioritas adalah mereka jang ditjalonkan oleh Inspeksi kesehatan seluruh Indonesia, dengan perdjandjian setelah lulus mereka akanditerima kembali oleh daerahnja. Mereka jang diterima adalah warganegara Indonesia laki2 danwanita, bersama antara 18 sampai 25 tahun belum pernah kawin, dan berbadan sehat dan berkelakuan baik, beridjazah SMP Negeri Bagian B Gaja lama atau SMP gaja baru dengan angka rata2 6.Selain itu mereka harus menjampaikan surat tidak terlibat G 30 S/PKI, surat idjin orang tua bagi mereka dibawah umur 21 serta memberikab 1 pas photo terbaru.

Pendidikan Asisten Rontgen itu akan berlangsung selama 3 tahun, dan selama itu para peladjar berikatan dinas dengan diberi uang ikatakn tetapi tidak diasramakan.

(R45/A-24/PAB/II/67)

----(w)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SU I MARET AKAN DIPERINGATI DIIBUKOTA2 KABUPATEN

Djakarta,28 Febr.(PAB)

Peristiwa bersedjarah tgl. 1 Maret 1949,jaitu berhasilnja gerilja kita merebut kota Djogjakarta se lama 6 djam dari tangan penduduk Belanda ,akan diperi ngati di Djogjakarta danbekas ibukota Keresidenan se luruh Djawa tengah.

Untuk daerah Djogjakarta, peringatan itu akan diselenggarakan pula diibukota2 Kabupaten.Tgl.1 Maret jad di Alun2Utara Djogjakarta akan diselenggarakan up pel ziarah ke Makam Pahlawan dan malam tirakatan.

Pimpinan ikatan karyawan RRI

Bertempat di Studio RRI Djogjakarta kemarin, telahdilan sungkan serah terima pimpinan Ikatan Karya wan RRI, dari Ki Marsito diputo ,kepada Ketua baru , Djanad.Care Taker Direktur Studio Nusantara-Dua-Abdul Hamid ,dalam sambutannja menegaskan pentingnja peranan IKARRI utk kesedjahteraan pegawai dan mensukseskan pro gram Kabinet dan perdjoangan Orba.

(R45/A-24/PAB/II/67).

----(w)----

PGRI SUMSEL DUKUNG PAK HARTO

Djakarta, 28 Febr (PAB)

Pengurus Daerah Persatuan Guru Indonesia Sum-Sel atas nama seluruh anggota nja menjatakan dukungan sepenuhnja terhadap seluruh kebidjaksanaan Pengemban Ketetapan MPRS No.9 th 1966Djendral Suharto sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sekarang ini.PGRI Sum sel djuga mendukung pernjataan ABRI baru2 ini jang me rupakan djaminan bagiterluksananja Dwi Dharma dan Tja tur Karya Kabinet Ampera.

(R45/A-24/PAB/II/67).

----(w)-----

KONGRES PGRI DI UNDUR

Djakarta, 28 Febr. (PAB)

Panitya Nasional Kongres ke 11 Persatuan Guru Republik Indonesia , menjatakan bahwa kongres mengalu mi perubahan waktu dari tgl.11 sampai dengan 20 Maret 1967 mendjadi tgl. 15 sampai dengan 21 Maret 1967.

Kongres ke 11 PGRIitu akan tetap diselenggara kan di Bandung.

(R45/A-24/PAB/II/67)

----(w)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 - 2 - '67

Landjutan Sidang Mahmilub Perkara ex Brigadir Djenderal Soepardjo :

1 OKTOBER 1965 KOL.SAELAN MEMBAWA PRESIDEN SUKARNO KE HALIM

Djakarta, 28 Febr(PAB).

Sidang ke VII Mahmilub dalam memeriksa dan mengadili tokoh Gestapu/PKI ex. Brigdjen.Soepardjo, Minggu malam dilandjutkan dengan mendengar keterangan2 saksi2 a.l. Kapten Suwarno, Kolonel Saelan dulu Wadan Men Tjakra Birawa, AKBP Mangil Dan DKP, AKP Jatiman, Major Tatang Sudibjo dari Kopur Linud Kostrad, dan bekas Dan Men Tjakra Birawa Brigdjen M.Sabur.

Saksi Djenderal M.Sabur atas pertanjaan Hakim Ketua menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 ia mengetahui bahwa Istana dalam keadaan ditingker (dikepung) oleh pasukan berbaret idjo dari seorang Major TNI jang memberitahukan sewaktu saksi dari Bogor dalam perdjalanan ke Djakarta. Saksi djuga menerangkan didepan sidang, bahwa pasukan jang mengepung Istana itu adalah pasukan dibawah pimpinan tertuduh (Supardjo).

Diterangkan oleh Saksi karena keadaan jang tidak mengizinkan maka saksi ke'Djakarta tidak dengan mobil tapi dengan pesawat Hellicopter, semula akan turun di Senajan akan tetapi karena ada ketjurigaan,saksi terpaksa kembali ke Bogor dan mengganti pesawat Hellicopternja jang lebih ketjil untuk dapat dihalaman Istana. Setelah tiba di Istana dan mengetahui bahwa Presiden ada di Halim, selandjutnja Saksi menudju Halim. Tiba di Halim terus ke rumah Komodor Susanto dan lapor kepada Presiden tentang adanja kedjadian dan ditempat kediaman Djenderal A.Yani terdapat bekas (tetesan darah). Dirumah Komodor Susanto hadir a.l. Men. Pangau Omar Dani, tertuduh (Supardjo), Komodor Leo Watimena, Saelan dan Djenderal Sunarjo. / mondarat

Ketempuhan buntut maung..:

Dalam dialoog antara Djenderal Sabur dengan ex. Brigdjen.Supardjo didepan sidang saksi katakan bahwa Supardjo pernah memberitahukan kepada saksi,bahwa tgl. 1 Oktober 1965,pagi datang di Istana untuk bertemu denganPresiden akan tetapi Presiden tidak ada. Selandjutnja di kemukakan oleh Supardjo, bahwa saksi djuga sebenarnja termasuk Djenderal jang akan diamankan oleh Gerakan 30 September. Saksi mengetahui bahwa tertuduh pernah datang sebanjak dua kali kerumah Komodor Susanto jaitu sekitar djam 14.00 dan djam 18.00 wib.

Sewaktu.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

28 - 2 - '67

Sewaktu saksi mendengarkan siaran adanja Dewan Revolusi dan tertjantumnja nama tertuduh, Saksi menanjakan pada tertuduh apa jang sebenarnja terdjadi. Dalam pada itu tertuduh mendjawab dengan bahasa sunda, bahwa tertuduh adalah "Katempuhan buntut maung" jang artinja tidak lain ia terbawa-bawa ikut bertanggung djawab (dalam G-30-S).

Dari Saksi Kolonel Saelan jang djuga didengar keterangannja mendjelaskan bahwa pada tgl. 1 Oktober 1965, Saksi mengetahui melalui tilpon jang disampaikan oleh Kombes Sumirat jang isinja menundjukkan ter djadi penembakan dirumah Leimena dan rumah Djenderal Nasution. Berita tersebut diterima sekitar djam 05.15 dan selandjutnja diterima lagi berita per tilpon jang menjatakan adanja penembakan dirumah Men.Pangau Omar Dani dan di rumah Djenderal Pandjaitan jang kemudian diralat bahwa penembakan jang sebenarnja terdjadi di rumah Pandjaitan bukan di rumah Omar Dani. Saksi djuga menerangkan, bahwa saksilah jang sebenarnja membawa Presiden ke Halim, dengan alasan Halimlah jang paling save untuk memberikan pengamanan terhadap Presiden. Diterangkan bahwa setiba di Halim jaitu di KOOPS telah ada Men Pangau Omar Dani dan Kom.Leo djuga ada tertuduh dengan memakai seragam PDH.

Presiden adakan pembitjaraan dengan Supardjo.

Saksi selandjutnja menerangkan, sekira djam 11.30 Presiden meninggalkan KOOPS menudju rumah Komodor Susanto, dan djam 12.00 Saksi mendengar adanja siaran Dewan Revolusi. Ditempat tersebut hadir antara lain Untung, Latief, Anwas djuga tertuduh. Diketahuinja bahwa tertuduh mengadjak pembitjaraan dengan Presiden. Atas pertanjaan Hakim Ketua, Saksi tidak mengetahui apa jang dibitjarakan antara tertuduh dengan Presiden.

Selandjutnja didengar djuga keterangan dari Saksi AKBP Mangil, jang menjatakan bahwa sekira djam 04.00 saksi mendengar adanja berita bahwa dirumah Djenderal Nasution dan dirumah Dr.Leimena ada tembakan. Saksi djuga mendengar adanja siaran Dewan Revolusi dan tertuduh jang saat itu ada ditempat kediaman Komodor Susanto sebagai Wakil Ketua Dewan Revolusi, tetapi Saksi dalam hal ini tidak tjuriga terhadap tertuduh.

Sidang djuga telah mendengarkan keterangan2 dari saksi2 Kapten Suwarno jang pada peristiwa G-30-S jaitu tgl. 1 Oktober 1965 djam 5.30 melakukan kontrol di Istana. Saksi telah mendengar dari Letkol Untung pada tgl. 30 September 1965 sekira djam 21.00 di Penajan jang pada waktu itu sedang mendjaga keamanan Presiden jang mengikuti musjawarah teknisi jaitu adanja Dewan Djenderal jang akan membahajakan keselamatan Presiden.

Saksi djuga.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 - 2 - '67

Saksi djuga mengetahui adanja anggauta Djenderal Supardjo jang datang di Istana sekira djam 5.30 dengan dikawal tiga perwira bersendjata lengkap. Saksi djuga menerangkan bahwa tertuduh (Supardjo) minta kepada saksi untuk bertemu dengan Presiden.

Djenderal Pardjo memaksa minta ketemu Presiden.

Saksi Major Tatang Sudibjo jang djuga memberikan kesaksian pada sidang ke VII Mahmilub menerangkan, saksi pernah menerima tilpon sebanjak tiga kali dan diantara nja tentang laporan adanja seorang Djenderal jang berna ma Supardjo mau bertemu dengan presiden dengan tjara - paksa. Dalam djawaban tilpon itu saksi selaku komandan Posko mendjawab, Bapak tidak ada ditempat secret punt. Dalam pada itu djuga saksi menerangkan bahwa Kapten Su warno akan mengambil alih Komandan Posko, hal mana menurut Saksi atas perintah Komandan Batalionnja (Letkol Untung). Saksi dalam hal ini mendjelaskan, bahwa Suwarno akan digantung oleh Komandannja djika tidak dapat mengam bil oper pimpinan keamanan Istana. Saksi mengetahui bah wa Istana telah dikelilingi oleh pasukan badju loreng, sedang sekira djam 07.00 saksi mengadakan hubungan dengan Djenderal Sabur jang kemudian pada djam 09.00 ternjata Djdneral Sabur datang dengan pesawat Hellicopter dari Bogor.

Saksi jang lain jaitu Adjun Komisaris Jatiman jang didengar keterangannja menjatakan, pada tgl.1 Oktober 1965 mendengar bahwa rumah Dr.Leimena ditembaki gerombolan, lalu saksi mentjeknja di POSKO dan SKOGAR melalui tilpon tapi tilpon putus. Dalam kesaksiannja, diterangkan bahwa saksi mengetahui adanja pasukan jang mentjurigakan disekitar Monas, dan achirnja saksi tahu, bahwa pasukan itu adalah dari Div.Diponegoro dan Brawidjaja. Dapat dikemukakan bahwa dalam sidang jang ke VII ini hadir Djaksa Agung Majdjen Sugih Arto, Pangdak VII/Djaya Irdjen Pol.Subroto dan Pangdamar III Harjono Nimpuno. Sidang berachir pada djam 01.00 wib. -

(R038/A-12/PAB/II/67).

----oSo----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 -2- ' 67

TELAH 5 TAHUN AEROFLOTMELAJANI HUBUNGAN UDARA DJAKARTA -MOSKOW

⊕ tidak pernah mengalami kerusakan.

Djakarta, 28 Febr (PAB)

Aeroflot salah satu perusahaan penerbangan terbesar di dunia dan jang telah berdiri selama 44 tahun , pada tgl. 2 Pebruari jl genap usianja 5 tahun melakukan dinas penerbangan tetap Moskow-Djakarta.

Untuk memperingati tahun ke 5 tsb diatas , malam ini bertempat di Wisma Aeroflot Kebajoran baru Djakarta akan dilangsungkan resepsi jang diselenggarakan oleh perwakilan peherbangan sipil USSR di Djakarta .

Vassili Avramkov,wakil tetap Kementerian Penerbangan sipil USSR di Djakarta, kemarin menerangkan pada pers, bahwa pembukaan lijn udara langsung Moskow -Djakarta telah memainkan peranan jang besar sekali dalam mendekatkan dan mempererat persahabatan dan kerdjasama serta saling pengertian antara kedua negara, terutama dibidang tehnik dan ekonomi.

Th1966 ada 48.000.000.

Dinjatakan lebih djauh oleh Avramkov ,bahwa untukmenilai besarnja armadajang dimiliki oleh Aeroflot sekarang ini, dapatlah sadja dilihat dari djumlah penumpang jang telahdiangkutnja dalam tahun 1966, jang berdjumlah 48 [illegible] djuta orang, dan dalam tahun 1967 ini dengan penambahan2 pesawat dengan djenis dan model terbaru aeroflot mengharapkan dapat mengangkut 57 djuta orang.

Dalam melaksanakan penerbangannja ke Indonesia ,dikatakan bahwa Aeroflot sedjak pertama hingga kini, tidak pernah mengalami suatu kerusakan jang disebabkan ketidak [illegible] beresan alat2 dan bagian2 tehniknja.

Demikian Vassili Avramkov menerangkan kemarin siang di kedutaan USSR dalam suatu wawantjara dengan pers.

(R036/A-9/PAB/II/67)

----(w)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

P 3 I DUKUNG PENGEMBAN KETETAPAN MPRS NO. IX DJEN[illegible]AL SUHARTO

Djakarta, 28 Pebruari (PAB)

DPP P3I (Pelopor Pemuda Progresif Indonesia) SOKSI telah mengutjapkan selamat dan mendukung Pengemban ketetapanMPRS NO. IX Djendral Suharto berkenaan dengan pengumuman 20 Pebruari. Dikatakan bahwa peristiwa tsb telah mempermudah Pengemban Ketetapan MPRS No. IX Djend. Suharto untuk menjelesaikan konflik politik dan konflik situasi dewasaini serta dapat menghindarkan kemungkinan suatu clash pisik.

Penjerahan kekuasaan pemerintah[an] oleh Presiden Sukarno itu oleh P3I dianggap/isolasi politik thd Soekarno dan lebih memudahkan Orde baru/memenangkan perdjoangannja. Kepada seluruh anggotanja diserukan untuk mensukseskan kebidjaksanaan dan strategi Djend. Suharto Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, serta selalu waspada thd setiap pantjingan provokasi untuk mengatjaukan situasi. Demikian pernjataan P3I./sebagai untuk

(R048/M/PAB/II/67)

----(w)----

BUKU JANG TIDAK BAIK UNTUK ANAK2

Djakarta, 28 Febr (PAB)

"Untuk mengetahui keadaan negaramu selama ini, dan untuk lebih djelas lagibagaimana peranan Presiden Sukarno memainkan peranannja dalam proses pengbantjuran ekonomi ,politik dan moral dalam waktu jang lalu, saja andjurkan adik2 membatja beberapa buah buku jang telah siap diterbitkan".

Demikian andjuran pak Tjip (Majdjen Sutjipto SH) kepada anggota2 inti Brigade Ampera Ade Irma Srjani Nasution jang terdiri dari peladjar2 SLP/SLA itu, pada kesempatan memberikan penggemblengan mental thd mereka di Aula Hankam Minggu pagi kemarin.

Dikatakan oleh Pak Tjip nama2 buku tsb jaitu buku2 jang bahannja disusun dari hasil team Mahmilub jang terdiri dari djilid I, II dan III, serta buku tulisan Djendral Nasution menanggapi Pel Nawaksara .Buku2 tsb memberikan tjukup bahan untuk diketahui, tetapi bukan untuk ditiru ! demikian pula diperingatkannja.

"Tetapi, chusus untuk adik2, jang umumnja masih dibawah umur 17 th, pak Tjip andjurkan untuk tidak membatja salah satu buku tsb, jaitu buku djilid ke III", karenaisinja tidak obah seperti buku tjabul jang mengerikan jang peranan utamanja adalah Bung Karno sendiri".

Demikian pak Tjip jang dengan rasa tanggung djawab sebagai seorang ajah, telah menasehati anak2nja untuk tidak meniru-niru perbuatan seperti jang telah dilakukan oleh Bung Karno. (R036/A-9/PAB/II/67)

----(w)----

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

28-2-1967.-

PENJERAHAN KEKUASAAN PRESIDEN SUKARNO, BUKANLAH KARENA APPROACH DARI PRESIDIUM KABINET ATAU DARI ABRI

" Tapi atas kemauan Presiden Sukarno sendiri.

Djakarta, 28 Pebruari (PAB).-

Dalam keterangan pemerintah jang disampaikan melalui TVRI/RRI telah didjelaskan bahwa penjerahan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 20 Pebruari 1967 bukanlah karena adanja approach dari Presidium Kabinet atau dari ABRI ataupun dari golongan2 atau oknum2, tapi semata2 atas prakarsa Presiden Sukarno sendiri.

Untuk djelasnja bersama ini kami mu atkan keterangan pemerintah tersebut setjara lengkap sbb.;

Terhitung mulai tgl.20 Pebruari 1967, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I. Sukarno telah menjerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, sesuai dengan djiwa Ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan djiwa Undang2 Dasar 1945.

Pelaksanaan penjerahan kekuasaan tersebut telah berlangsung pada hari Rabu malam tanggal 22 Pebruari 1967 bertempat di Istana Merdeka dihadapan Presidium dan Menteri Kabinet Ampera lengkap. Dan pada malam itu djuga, setelah sidang Kabinet, Menteri Penerangan telah menjiarkan penjerahan kekuasaan tersebut kepada segenap Rakjat Indonesia, bertempat digedung Presidium Kabinet di Djalan Merdeka Barat.

Berhubung dengan penjerahan kekuasaan tersebut, Pemerintah mengetahui, bahwa beberapa waktu sebelumnja, ditengah masjarakat dan dalam surat2 kabar telah tersiar luas beraneka ragam berita dan pendapat mengenai soal penjerahan kekuasaan jang telah terdjadi itu, jang pada umumnja satu sama lain menimbulkan berbagai matjam perkiraan dan penafsiran. Antara lain dihubungkan dengan berita2 tersebut personil approach, clearing approach dan sebagainja.

Berkenaan dengan berita2 tersebut, Pemerintah menganggap perlu menjampaikan penjelasan kepada segenap bangsa Indonesia tentang persoalan jang sebenarnja dari peristiwa bersedjarah jang penting ini.

Terutama perlu didjelaskan, bahwa adanja penjerahan kekuasaan tersebut oleh Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I., bukanlah karena sesuatu approach dari Presidium Kabinet, bukan pula karena sesuatu approach dari Angkatan Bersendjata RI dan bukan pula karena sesuatu approach dari golongan2 atau oknum2.

Penjerahan.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

Penjerahan kekuasaan tersebut oleh Presiden/ Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I. telah terdjadi dengan prakarsa Presiden Sukarno jang bersumber pada surat beliau tanggal 7 Februari 1967 tentang kemungkinan penjerahan suatu tugas chusus oleh Presiden kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Dan dari pengumuman penjerahan kekuasaan Presiden Sukarno tgl.20 Pebruari 1967, djelas pula prakarsa Presiden itu, jakni adanja konflik politik jang perlu segera diachiri demi keselamatan rakjat, Bangsa dan Negara, jang menjebabkan Presiden Sukarno menjadari perlu adanja penjerahan kekuasaan tersebut.

Dan dalam hubungan ini, Presiden Sukarno menjerukan pula kepada seluruh Rakjat Indonesia, para Pemimpin Masjarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan seluruh ABRI untuk terus meningkatkan persatuan, mendjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnja pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966.

Seruan tersebut adalah djuga harapan Pemerintah dan rakjat Indonesia.

Chusus mengenai bantuan bagi pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, sedjak semula dari tanggal 11 Maret 1966, telah berulang-ulang diserukan dan diharapkan oleh Pemerintah, demi keselamatan Rakjat, Bangsa dan Negara. Dan pada waktu ini djuga, Pemerintah mengulangi lagi seruan dan harapan-2 tersebut

Lebih landjut mengenai prakarsa Presiden Sukarno tentang penjerahan kekuasaan tersebut, Pemerintah menganggap perlu menjampaikan pendjelasan tentang rangkaian peristiwa dari surat Presiden Sukarno tgl.7 Februari 1967 tersebut diatas, sebagai berikut:

* Proses terdjadinja penjerahan kekuasaan Presiden.

Setelah menerima surat Presiden Sukarno tgl.7 Februari 1967, maka pada tanggal 8 Pebruari 1967 diselenggarakan rapat Panglima ke A Angkatan. Rapat memutuskan tidak dapat menerima isi dari surat Presiden Sukarno itu, jang maksudnja mempersoalkan pembagian kekuasaan antara Presiden dan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, jang berarti tetap adanja dualisme dalam Pemerintahan, jang selama ini merupakan hambatan bagi usaha mensukseskan program2 Kabinet Ampera. Penolakan ABRI terhadap surat Presiden tersebut, dilaporkan Djen Pol Soeharto kepada Presiden Sukarno pada tgl.10 Pebruari 1967. Karena penolakan tersebut, Presiden Sukarno melandjutkan approach beliau tentang kemungkinan djalan jang dapat ditempuh beliau dalam hal penjerahan kekuasaan.

Kemudian.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28-2-1967.

Kemudian pada tgl.11 Pebruari 1967, ke 4 Angkatan Bertemu lagi dengan Presiden Sukarno di Bogor, dimana ABRI menegaskan lagi pendiriannja, jang menghendaki dihormatinja djalan konstitusionil dan ketetapan2 Sidang Umum ke-IV MPRS. Pada achir pertemuan, Presiden Sukarno meminta lagi untuk bertemu pada esok harinja. Sesuai dengan permintaan Presiden Sukarno itu, pada tgl. 12 Pebruari 1967 ke 4 Panglima Angkatan bertemu lagi dengan Presiden Sukarno di Bogor. Dan pada pertemuan inipun, Presiden Sukarno meminta lagi untuk bertemu pada esok harinja.

Maka pada tgl.13 Pebruari 1967, para Panglima ABRI berapat lagi mempersoalkan approach Presiden Sukarno tersebut, dan didapat kata sepakat untuk mengutus Men/Pangak Djendral Polisi Sutjipto Judodihardjo dan Wa Pangad Letdjen Panggabean kepada Presiden Sukarno- guna mempersoalkan kehendak jang sebenarnja dari Presiden Sukarno. Pertemuan kedua utusan ABRI ini dengan Presiden Sukarno - berachir dengan suatu tanggapan pada pihak ABRI, bahwa tidak akan ada lagi pertemuan landjutan.

Tetapi kemudian Presiden Sukarno mengutus pula Sekretaris Militer Presiden Major Djendral Soerjo Soempeno kepada ABRI, dengan membawa pesan bahwa Presiden Sukarno telah mengerti akan pendapat dan pandangan ABRI. Tetapi dalam pesan Presiden Sukarno tersebut, disertai pula permintaan djaminan2. Djaminan2 jang dapat diberikan oleh ABRI adalah iktikat baiknja berdasarkan rasa pengabdian pada Nusa, Bangsa dan tanah Air. Lebih dari itu tidak dapat diberikan oleh ABRI, karena akan menghadapi kesukaran2 dalam pelaksanaannja.

Djuga dalam pesan jang dibawa oleh Majdjen Soerjo Soempeno, Presiden Sukarno meminta untuk dapat bertemu lagi dengan para Panglima ABRI pada tgl.19 Pebruari 1967. Guna pertemuan tgl.19 itu, ke 4 Angkatan bermusjawarah lagi untuk lebih membulatkan sikap dan pandangan.

* Presiden panggil Men/Pangal

Pertemuan pada tgl.19 Pebruari 1967 di Bogor antara Presiden, Djendral Soeharto dengan Panglima2 Angkatan, tidak sampai kepada suatu kesimpulan. Tetapi diputuskan untuk keesokan harinja mengadakan pertemuan landjutan jang serupa di Djakarta.

Tibu2 pada keesokan harinja tgl.20 Pebruari 1967, Presiden Sukarno memanggil Men/Pangal Laksamana Laut Muljadi. Untuk memenuhi panggilan tersebut, Men/Pangal lebih dulu menerima petundjuk2 dari Djendral Soeharto. Presiden Sukarno dapat menerima petundjuk2 Djendral Soeharto tersebut, sehingga mengundang Djendral Soeharto dan para Panglima Angkatan pada djam 17.00 hari itu ke Istana untuk menjaksikan penandatanganan dari pengumuman penjerahan kekuasaan tsb, sedangkan.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

sedangkan pengumumannja kepada Rakjat ditunda, menantikan hari jang dianggap baik oleh Presiden Sukarno; sehingga sebagai akibatnja, pengumumannja telah terdjadi pada tgl.22 Pebruari 1967 djam 19.30 bertempat di Istana Merdeka dengan disaksikan oleh anggauta2 Kabinet Ampera.

Dari rangkaian proses tersebut diatas ini, djelas terlihat bahwa penjerahan kekuasaan oleh Presiden/Mandaturis MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I. kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/66 telah terdjadi atas prakarsa Presiden Sukarno dan sekali2 bukan karena sesuatu approach kepada Presiden Sukarno.

Peristiwa ini adalah chas Indonesia dan tidak dapat dibanding atau dinilai dengan sedjarah bangsa dan Negara lain.

Berhubung dengan peristiwa ini, Pemerintah sekali lagi menegaskan pendirian jang telah ditetapkannja dalam sidangnja tgl.8 Pebruari 1967 jl., jakni bahwa penjelesaian situasi konflik dengan djalan konstitusionil, dengan berpegang teguh pada Undang2 Dasar 1945, Ketetapan2 Sidang UMUM ke-IV MPRS dan ketentuan2 konstitusionil lainnja.

Peristiwa penjerahan kekuasaan jang penting ini tidak lepas dari pada djalan konstitusionil.

Dan pemerintah berpanggapan, bahwa peristiwa ini menudju kepada pelaksanaan kedaulatan rakjat jang sepenuhnja dilaksanakan oleh MPR (S).

Djuga mengenai sidang umum Istimewa MPRS jang akan datang, Pemerintah menegaskan kembali pendirian nja jang membantu dan mendukung terselenggarannja sidang umum istimewa tersebut.

Berhubung dengan sikap dan pendirian Pemerintah tersebut diatas ini, dalam hubungannja dengan penjerahan kekuasaan jang telah terdjadi, Pemerintah mengemukakan lagi disini akan pidato dari pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 tgl.23 Pebruari 1967, jang antara lain menegaskan, bahwa penjerahan kekuasaan tersebut adalah sesuai dengan djiwa Ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 dan tidak mengurangi maksud dan djiwa Undang2 Dasar 1945. Djuga menegaskan, bahwa Pengumuman penjerahan mengandung materi pernjataan penjerahan kekuasaan Pemerintahan Negara dengan imbalannja tanggung-djawab menurut Undang2 Dasar 1945 kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966.

Djuga Pemerintah mengemukakan disini pernjataan ABRI 24 Pebruari 1967 jang menegaskan bahwa penjerahan kekuasaan Pemerintah jang telah terdjadi merupakan penjerahan keseluruhan kewenangan dan tanggung djawab kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, jang didasarkan pada dan sesuai dengan djiwa Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. Dan ABRI dengan penuh rasa tanggung-djawab memikul segala konsekwensi atas isi jang tersirat dan tersurat dalam Pengumuman Presiden tgl. 20 Pebruari 1967, jang merupakan suatu upaja rintisan penjelesaian konflik politik.

Penjerahan...

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

28-2-1967.-

* Penjerahan kekuasaan jang telah terdjadi perlu dimanfaatkan.

Dengan pendjelasan ini, Pemerintah mengharapkan pengertian dan keinsjafan mengenai peristiwa penjerahan kekuasaan ini, agar tidak terkena perangkap gerpol dari sisa2 Gestapu/PKI dan Orde Lama, jang masih berusaha membitnah dan memetjah-belah persatuan dan kesatuan ABRI dan Rakjat Indonesia.

Dengan peristiwa ini, perdjuangan Orde Baru belum selesai. Peristiwa ini hanja merupakan suatu tahap landjutan dalam perdjuangan Orde Baru. Perdjuangan Orde baru untuk menegakkan Pantja Sila dan Undang2 Dasar 1945 setjara murni, masih terus menuntut kewaspadaan.

Salah satu tugas pokok Orde Baru dan seluruh Rakjat Indonesia dalam suasana apapun djuga ialah tetap untuk mensukseskan Kabinet Ampera. Pelaksanaan penjerahan kekuasaan jang telah terdjadi perlu dimanfaatkan guna memperlantjar pelaksanaan dari Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera. Suksesnja Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera merupakan sasaran untuk melakukan pembangunan Bangsa dan Negara menudju kepada masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantja sila.

Kita bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa atas segala rachmat jang telah dikaruniakanNja kepada Rakjat Indonesia. Dan kita berdoa, semoga perdjoangan Orde Baru akan selalu diridhoiNja. A m i n .-

(R45/A-25/PAB/II/67).-

---- S1 ----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 - 2 - '67

Sidang Mahmillub Supardjo ke VIII:

SUPARDJO MENJANGKAL TELAH MENGAMBIL DJENDERAL2.

Djakarta, 28 Febr(PAB).

Sidang ke VIII Mahmilub jang berlangsung Senin pagi kemarin dilandjutkan dengan mendengarkan 4 orang saksi sedang 2 orang saksi lainnja berhalangan hadir. Keempat saksi jang didengar antara lain Brigdjen Sunarjo Tirtonegoro (pensiunan), Kombes Sumirat (Adjudjan Presiden), Kolonel KKO Bambang Widjanarko (adjudan Presiden) dan Brigdjen Sutardhio bekas Menteri Djaksa Agung Kabinet 100 Menteri.

Dapat dikemukakan bahwa Saksi2 jang berhalangan adalah Dr.J.Leimena bekas Waperdam II Kabinet 100 Menteri dan Latief jang mana keduanja berhalangan karena sakit. Demikian djuga Pembela Tjiam SH sampai pada sidang jang ke VII & ke VIII ini, untuk ketiga kalinja tidak datang karena persoalan jang sama terganggu kesehatannja.

Brigadjen Sunarjo Tirtonegoro jang mengenakan stelan djas biru2 dengan mengenakan dasi dan kemedja putih menerangkan, bahwa pada tgl. 1 Oktober 1965 ia pergi ke Istana untuk menemui Presiden tetapi ternjata Presiden tidak ada di Istana kemudian saksi mentjari Presiden di Grogol ditempat kediaman Ibu Hariati. Dari Grogol dengan Presiden pergi ke Halim bersama sama satu kendaraan. Setiba di Halim terus kesuatu gedung jang achirnja saksi tahu bahwa gedung itu ternjata jang disebut KOOPS, dari tempat tersebut saksi tahu bahwa tertuduh pernah laporan kepada Presiden telah mengambil tindakan2 terhadap Perwira2 TNI, jang selandjutnja tertuduh pergi untuk mengambil bukti2 jang akan disampaikan pada Presiden.

Omar Dani lapor pada Presiden.

Saksi djuga menerangkankepada sidang, bahwa dengan adanja tindakan kepada perwira2 TNI itu, Omar Dani melaporkan kepada Presiden bahwa segala sesuatu njaBrigdjen Supardjo akan melaporkan. Tentang Caretaker Pimpinan AD saksi pernah menjarankan agar Majdjen Pranoto ditundjuk sebagai care taker Pimpinan AD. Sementara itu sesuai dengan keterangan saksi bahwa Supardjo pernah melapor kepada presiden telah mengambil djenderal2, tertuduh jang diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua menjatakan sangkalannja. Sedang kepergian Presiden ke Bogor diterangkannjaadalah sekitar djam 22.00 jang mana saksi djuga ikut dan kembali ke Djakarta sekira djam 01.00 wib.

Kesaksian.....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 - 2 - '67

Kesaksian selandjutnja adalah jang diberikan oleh Adjudan Presiden Kolonel Bambang Widjanarko, di terangkannja bahwa tgl. 30 September 1965 malam hari saksi mengikuti Presiden di Senajan dan mengantarkan nja kembali ke Istana Merdeka. Seperti diketahui bah wa saat itu di Senajan berlangsung Musjawarah Teknisi Indonesia. Saksi mendengar dari Sumirat sekira djam 5.30 per tilpon adanja pentjulikan terhadap beberapa Djenderal. Saksi pada kira2 djam 6.15 per ke Senajan untuk mengikuti General Ropebisi dalam rangka HUT ABRI. Saksi melihat di Senajan adanja tentara sebesar satu divisi dan adanja lowongan2 jang tidak mengikuti re petisi tsb jang menurut saksi adalah Brigade Djakarta.

Tidak ada ultimatum dari Kos trad.

Saksi Bambang Widjanarko mengakui bahwa ia pernah diperintah oleh Presiden untuk memanggil a.l. Pangak, Pangal dan Pangdam V dimanawaktu itu saksi pergi ke Kostrad dan bertemu dengan Djenderal Suharto. Kemudian Saksi melapor kepada Djenderal Suharto, jang mana dinjatakan bahwa Djenderal Pranoto dipanggil pre siden. Kemudian Djenderal Suharto katakan pada saksi, sampaikan kepada Bapak bahwa Djenderal Pranoto tidak dapat datang di Halim, sedang Djenderal Suharto telah mengambil oper Pimpinan AD dan diharapkan oleh Djende ral Suharto agar saksi berusaha supaja Bapak meninggal - kan Halim. Saksi kembali ke Halim sekira djam 20.00 lewat Djl.Djakarta By Pass, dimana saksi melihat ada truck2 dengan pasukan.

Setiba di Halim saksi melapor kepada Presiden jang isinja Djenderal Pranoto tidak dapat datang, Pak Suharto ambil pper pimpinan AD, dan djika ada apa2 ha rap hubungan dengan djenderal Suharto. Saksi mendjelas kanbahwa dari Kostrad tidak ada ultimatum akan menjerang, akan tetapi ini adalah analisa saksi sendiri sebagai seorang militer dan pernah memegang pasukan. Hal mana ada hubungannja dengan kata2 Djenderal Nasution sewak tu di Kostrad jang mengatakan, bahwa untuk mengambil tin dakan memulihkan keamanan secara teknis militer dan politis. Saksi djugajang mengandjurkan Presiden segera meninggalkan Halim, karena menaruh ketjurigaan kepada, AURI. Saksi menerangkan kepada Presiden, karenamenurut saksi Bapak kadang2 Koppig keterangan manaa.l. agar ba pak djangan memakai pesawat terbang, bapak djangan ter lalu djauh meninggalkan Djakarta dan diterangkan bahwa djalan antara Halim dan Bogor adalah aman.

Supardjo djongkok lapor ke- pada Presiden.

Dr.J.L[illegible]imena jang berhalangan karena sakit, mem berikan kesaksian didepan Mahmilub dengan tjara tertulis jang isinja a.l. : Saksi tidak kenal pada tertuduh, teta pi saksi pernah melihatada orang berpakaian seragam bidjau

memberikan....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

memberikan laporan dengan tjaradjongkok kepada Presi den. Kemudian saksi mendjelaskan, ternjata orang jang berbadju hidjau dan memberikan laporan kepada presiden di Halim itu adalah ex Brigdjen Supardjo. Tetapi dalam kesempatan jang diberikan oleh Hakim Ketua kepada ter tuduh, maka tertuduh menjangkal bahwa ia tidak melaku kanlaporan dengan tjara djongkok. Sedang Saksi mende ngar bahwa Djenderal A.Yani cs telah gugur adalah se waktu berada di Istana Bogor jaitu tgl.2 Oktober 1965. Tentang G-30-S/PKI saksi tidak tabu apa2,tetapi saksi berpendapat bahwa PKI lah memegang peranan dalam gerak an tsb.

Saksi lain adalah Brigdjen Sutardhio, didepan sidang menerangkan, bahwa tgl. 1 Oktober pagi ia per nah terimatilpon dari Ibu Tojo kemudian saluran terput tus.

Saksi selandjutnja dalam kebingungan mendapat keterangan dari Ibu Sutojo, bahwa suaminja ditjulik oleh gerombolan dan Ibu Tojo sendiri datang kerumah Saksi. Saksi menudju ke Halim setelah mengetahui bah wa Presiden selamat dari Brigdjen Sunarjo tiba di Ha lim djam 12.00 wib. Saksi kemudian dengar adanja sia ran dari RRI tentang Dewan Revolusi dan dengar bahwa tertuduh sebagai Wakil Dewan Revolusi tsb, selain itu dengan adanja pendemisioneran Kabinet dan penurunan pangkat. Sedang atas pertanjaan Hakim Ketua saksi me nerangkan bahwa Dewan Djenderal sebenarnja tidak ada, karena sudah ada clearing antara Presiden dengan Djen deral A.Yani. Saksi selandjutnja adalah saksi Latief jang dilakukan setjaratertulis, tentang kegiatan tertu duh sekitar tgl. 30 September 1965.

(R038/A-12/PAB/II/67).

----oSo-----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M : 28 - 2 - '67

BANJAK JANG INGIN MENDISKREDITKAN
PT. PP. BERDIKARI .

+ Organisasi "Perkadiri" ter bentuk.

Djakarta, 28 Febr(PAB).

Sekaragg ini banjak usaha2 jang dilakukan oleh sementara golongan untuk mendiskreditkan PT PP Berdi kari, dan tudjuan utama golongan2 tsb sebanarnja ada lah untuk merebut posisi Pimpinan dalam PT PP Berdi kari. Demikian dikatakan oleh Sekdjen SOKSI Utojo Us man SH dalam sambutannja pada upatjara pelantikan De pipus (Dewan Pimpinan Pusat) Perkadiri (Persatuan Kar yawan PT.PP.Berdikari) jang dilangsungkan dikantor PT.PP.Berdikari, Senin petang.

Utojo Usman SH, jang djuga mendjadi anggota DPR GR dan MPRS, selandjutnja mengatakan, bahwa golongan2 jang ingin mendiskreditkan PT PP Berdikari itu seka rang baru berani muntjul, padahal pada waktu PT Aslam-Karkam masih berdiri mereka takut menghadapi tukang2 pukul Aslam dan Karkam. Merekasekarang ingin merebut posisi Pimpinan didalam PT.PP.Berdikari, tetapi mere ka melupakan resiko apa jang harus ditanggung oleh PT.PP.Berdikari pada waktu berdirinja. Demikian a.l. Utojo Usman SH.

Perkadiri sebagai basis SOKSI.

Perkadiri, jang Depipusnja telah dilantik itu adalah merupakan salah satu basis SOKSI, oleh karena itu tugasnjapun disamping harus mensukseskan program2 Kabinet Ampera dan mengamankan PT.PP.Berdikari, djuga harus mengamankan basis2 SOKSI.

Pengurus Perkadiri terdiri dari 17 orang, dengan Ketua Umumnja Rusdi Sastrodihardjo, dan Sekretarisnja Bainir Wahid.

Sementara itu, Direksi PT.PP.Berdikari Eddy Tjahaja jang mewakili Direktur Uaum, dalam sambutannja a.l.me negaskan, bahwa dengan terbentuknja Perkadiri itu sama sekali tidak akan mempengaruhi langkah2 kebidjaksanaan jang akan diambil oleh Direksi. Direksi tetap akan meme tjat para karyawan jang njeleweng tanpa pandang bulu, dan tidak perduli apakah ia anggota Perkadiri atau bukan.

Upatjara pelantikan tsb dihadiri oleh Dirut/Kupe nas SOKSI Kol. Suhardiman, para anggota Depinas SOKSI, serta para Direksi dan karyawan PT.PP.Berdikari. -.

(RO4/A-II/PAB/II/67).

----oSo----

S E L E S A I

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LUAR NEGERI : 28 - 2 - '67

GOLDBERG ADAKAN PEMBITJARAAN2 DI TOKYO

Djakarta, 28 Febr(PAB).

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Goldberg telah mengadakan pembitjaraan2 dengan menteri luar negeri Djepang Takeo Mikio setibanja di Tokyo. Goldberg tiba di Djepang dalam rangka perlawatannja dibeberapa negara antara lain ke Korea Selatan, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Dalam pertemuan itu dibitjarakan masalah Tjina Komunis, Vietnam dan soal2 ekonomi.

Berita lain mengabarkan bahwa para pemimpin Katholik Vietnam Selatan menjatakan tjemas terhadap akan diselenggarakannja demonstrasi2 perdamaian di Brusel oleh ummat Katholik Belgia mengenai Vietnam. Pernjataan itu disampaikan kepada Paus Paulus dan pemerintah Belgia. Ummat Katholik Vietsel menjatakan bahwa mereka bukan menentang perdumaian di Vietsel tetapi tidak menghendaki Vietsel "didjual" kepada kaum komunis.

(R45/A-24/PAB/II/67).

----oOo----

MONGOLIA MENTJAP MAO IMPERIALIS

Djakarta, 28 Febr(PAB).

Ketua Negara Mongolia dalam perajaan ulang tahun Angkatan Perang Uni Sovjet di Ulan Bator telah mentjap dan menuduh Ketua Mao sebagai seorang imperialis. Memberikan sambutan pada ulang tahun tsb, Ketua Mongolia menjerukan pemimpin2 Komunis Tjina untuk kembali merobah perdjoangan mereka dan kembali kepada dasar2 Marxis dan Leninis. -

(R45/A-24/PAB/II/67)

----oOo----

SIDANG 20 NEGARA2 KOMUNIS DI WARSAWA BERACHIR.

Djakarta, 28 Febr(PAB).

20 negara Komunis telah mengachiri pembitjaraan2 mereka di Warsawa, tanpa ikut hadirnja Tjina Komunis dan Albania. Tidak diperoleh kabar keterangan pasti mengenai isi pembitjaraan, namun diduga bahwa pembitjaraan2 adalah masalah keamanan Eropa. Djuga mungkin dibitjarakan Tjina Komunis.

(R45/A-24/PAB/II/67).

----oOo----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

50 NEGARA BELUM MELAPOR KEPADA PBB TENTANG SANKSI THD RHODESIA

Djakarta, 28 Febr(PAB).

Menurut Sekdjen PBB U Thant, sampai sekarang 70 negara telah menjatakan dukungan atas sanksi2 PBB terhadap Rhodesia. Tetapi kira2 50 negara lain-nja tidak melaporkan kepada U Thant mengenai sanksi2 itu.

Demikian menurut BBC. -

(R45/A-24/PAB/II/67).

----oSo----

DARI SIDANG DEWAN ORGANISASI A - A DI KARACHI

Djakarta, 28 Febr(Pab).

Dewan Organisasi Afrika Asia untuk kerdja sama ekonomi telah membentuk komisi jang beranggautakan 14 negara. Dalam rapatnja di Karachi, komisi itu akan memberikan saran2 untuk memadjukan kerdja sama per-dagangan antara negara2 didaerah itu serta mengada-kan perdagangan bebas dalam barang2 dagangan terten-tu. -

(R45/A-24/PAB/II/67).

----oSo----

S E L E S A I

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

OLAH RAGA : -1- 28 - 2 - '67

FRIENDLY GAMES KKO - AURI - PWI
D J A Y A .

Djakarta, 28 Febr(PAB).

Dalam rangka lebih meningkatkan pengintegrasi an antara Angkatan Bersendjata dengan Angkatan Bersendjata, Rabu besok bertempat di Kesatrian KKO Djl. Kwini Djakarta akan dibuka Friendly Games antara Kodamar III/KKO dengan Kowilu V/Men.II Kopasgat.

Friendly Games tsb akan berlangsung selama tiga hari dan upatjara penutupan akan dilangsungkan pada tgl. 3 Maret 1967 bertempat di MB.Kowilu V Djl.Gatot Subroto Mampang Djakarta.

Tjabang2 Olahraga jang akan dipertandingkan adalah Volley Ball, Tennis Medja, Tennis, Pulu Tangkis, Bola Tangan, Basket Ball dan pertandingan bola kaki adalah gabungan Kodamar III dan Kowilu V melawan Kesebelasan PWI Djakarta Raya. -

(R34/A-7/PAB/II/67). -

-----oSo-----

S E L E S A I

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENERTIBAN DALAM APARATUR EKONOMI SUPAJA SEGERA DILAKSANAKAN

Djakarta28 Febr(PAB).

Perkembangan politik sesuai dengan idee jang baik kembali ke UUD 45 Pantjasila Keputusan2 MPRS, boleh dikatakan sudah menang, baik jangbersifat resolusi Nuddin Lubis maupun resolusi Djamaludin Malik. Maka sekarang jang perlu kita tanggapi setjara drastis, tepat simultan dan mataton adalah soal mengenai ekonomi, jang sekarang ini bagi pegawai negeri, buruh pradjurit, masih mengalami penderitaan jang berat. Maka untuk itu diharapkan, Pemerintah segera mentjari djalan keluar untuk mendjelaskan dan memberikan ampera. Demikian dinjatakan oleh Anggota Komisi "D" DPRGR Murtadji Bisri kemarin pada pers.

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) tiap orang November 1966 - Rp.751,30 Desember 1966 - Rp.713,39 Djanuari 1967 - Rp.766,53 kemudian tanggal 15 Februari 1967 - Rp.892,05. Kalau dikatakan kebutuhan fisik minimum ini artinja pegawai tidak bisa menerima tamu, rekreasi dll. Sedang sekarang menurut peraturan2 jang ada, pegawai dan buruh dan pradjurit ada jang berga dji Rp.50,- - Rp.150,-. Lalu bagaimana dengan imbangan kebutuhan fisik minimun ini. Demikian ditanjakan oleh anggota Murtadji Bisri. Maka oleh karena itu, demikian Murtadji Bisri selandjutnja, hal ini hendaklah mendapat tanggapan jang serius.

Titik tolak perbaikan ekonomi, sebenarnja sudah tertjermin didalam lampiran IV UUD APBN 1967 dan memorandumnja. Dalam hal ini titik beratnja kepada empat pokok a.l. mengenai pembubaran2 Lembaga inskonstitusionil, dalam hal ini menudju kearah syncronisasi aparatur negara dan menempatkan fungsinja pada tempatnja. Maka oleh karena itu Murtadji Bisri meminta hendaknja penertiban didalam aparatur ekonomi djuga segera dilaksanakan setjara drastis dan tegas. Dengan demikian, Insja Allah ekonomi ber-angsur2 akan baik. Dengan baiknja ekonomi dengan sendirinja perbaikan nasib pegawai negeri, buruh dan pradjurit akan dapat dilaksanakan.

Kini DPRGR dan Pemerintah sedang mentjari djalan keluar untuk menanggapi kenaikan tarif dan perbaikan nasib buruh, pradjurit dan pegawai. Diharapkan dalam waktu jang se-singkat2nja sudah dapat dirumuskan sesuai dengan keinginan, demikian Murtadji Bisri, -

(R36/A-10/PAB/II/67).-

----oso----

S E L E S A I

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA